



**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

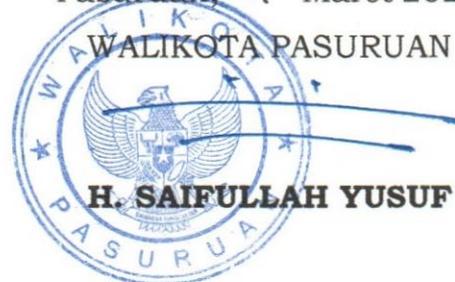
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sumber informasi utama data yang dituangkan dalam RLPPD adalah berasal dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi, sedangkan data untuk capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih, semoga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, 21 Maret 2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sumber informasi utama data yang dituangkan dalam RLPPD adalah berasal dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi, sedangkan data untuk capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih, semoga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, Maret 2022

WALIKOTA PASURUAN



H. SAIFULLAH YUSUF

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 yang merupakan amanat konstitusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yaitu Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kepala Daerah juga wajib menyampaikan Ringkasan LPPD kepada Masyarakat dan masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD tersebut sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup urusan konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dengan tujuan meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah.

Ringkasan LPPD Tahun 2021 memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial), hasil Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan Inovasi Daerah.

Melalui Penyampaian Ringkasan LPPD Tahun 2021 ini diharapkan diperoleh masukan dan saran dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Dekonsentrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/926/OTDA Tanggal 26 Januari 2022 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra-Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Pasuruan dengan wilayah seluas 39 Km², berlokasi di pesisir pantai utara pulau Jawa, tepatnya di sisi selat Madura. Secara astronomis terletak antara 112°45'-112°55' Bujur Timur dan 7°35'-7°45' Lintang Selatan. Wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, yakni Kecamatan Kraton di sebelah barat, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Gondangwetan di sebelah selatan dan Kecamatan Rejoso di sebelah timur; sementara sisi utara, berhadapan langsung dengan selat Madura.

Secara topografi, sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, dengan ketinggian daratan rata-rata ±4 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1persen, yang melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: sungai Gembong, sungai Petung dan sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan. Lokasi pembentukan tanah aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan lahan yang berada di sekitar muara sungai. Tanah hasil sedimentasi tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal tambak dan mangrove.

Secara hidrologi, wilayah Kota Pasuruan hanya terdiri atas air permukaan, yakni sungai. Sebagai wilayah pesisir, wilayah

Kota Pasuruan menjadi lintasan ataupun muara sungai besar yang berhulu di kabupaten tetangga. Terdapat tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, yakni: sungai Welang, sungai Petung dan sungai Gembong. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di selat Madura, berkarakter melandai, sehingga seringkali mengalami sedimentasi, terutama di saat musim hujan.

II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,26	75,62	0,47 %
2.	Angka Kemiskinan	6,66	6,88	3,19 %
3.	Angka Pengangguran	6,33	6,23	-1,6 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-4,33	3,64	18,95%
5.	Pendapatan (PDRB) Perkapita(juta rupiah)	39.92 juta	40.53 juta	1,50 %
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,31%	0,35%	11,4%

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan Tahun 2021 mencapai 75,62 dan menempatkan pencapaian status pembangunan Kota Pasuruan pada kelompok “Tinggi”. IPM Kota Pasuruantahun 2021 sebesar 75,62 atau tumbuh 0,47 persen dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 75,26, mengalami perlambatan pertumbuhan IPM dibanding tahun-tahun sebelumnya karena pengaruh pandemi Covid-19 di Kota Pasuruan.

2. Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 naik menjadi 6,88 persen. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 6,66 persen naik 0,20 pointer hadap Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 13.400 orang, naik 480 orang terhadap Maret 2020.

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari Agustus 2020 sebesar 6,33 persen menjadi 6,23 persen Agustus 2021, dengan asumsi bahwa terdapat 6 orang pengangguran dari 100 orang Angkatan kerja di Kota Pasuruan. Jumlah Angkatan Kerja mencapai 108.511 orang, sejalan dengan naiknya angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan, TPAK Agustus 2021 sebesar 70,05 persen, meningkat 2,24 persen dibandingkan tahun 2020.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar -4,33 persen menjadi sebesar 3,64 persen pada tahun 2021.

5. Pendapatan perkapita

Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS. Pada periode Desember 2021, Garis Kemiskinan meningkat sebesar 4,35 persen atau naik Rp. 7.096,- per kapita per bulan, yaitu Rp. 441.531,- per kapita per bulan pada Desember 2020, menjadi Rp. 461.624,- per kapita per bulan pada Desember 2021.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Persoalan kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-

rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 1,150 naik 0,380 dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,77, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 0,270 naik 0,140 dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,130, mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan penduduk semakin berkurang.

III. CAPAIAN KINERJA

III.1 Capaian kinerja urusan wajib pemerintahan berdasarkan pelayanan dasar sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 200.366.565.120,- direalisasikan sebesar Rp. 139.909.962.045,- atau tingkat serapannya mencapai 69,83%.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Soedarsono. Dinas Kesehatan didukung oleh pelaksanaan 5 program dan 21 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 144.077.203.455,- direalisasikan sebesar Rp. 119.604.860.031,- atau tingkat serapannya mencapai 83, 04% sedangkan RSUD dr. R. Soedarsono didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 5 kegiatan

- dengan jumlah pagu anggaran Rp. 110.702.079.159,- direalisasikan sebesar Rp. 94.452.138.015,- atau tingkat serapannya mencapai 85,32%
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 104.709.623.827,- direalisasikan sebesar Rp. 42.596.848.302,- atau tingkat serapannya mencapai 40,68%.
- d. Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung oleh pelaksanaan 6 program dan 6 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 25.559.490.731,- direalisasikan sebesar Rp. 22.134.903.654,41,- atau tingkat serapannya mencapai 86,60%.
- e. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 10 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 13.616.955.227,- direalisasikan sebesar Rp. 11.047.537.906,- atau tingkat serapannya mencapai 81,13%.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dilaksanakan oleh Satuan Dinas Sosial didukung oleh pelaksanaan 6 program dan 15 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 23.515.822.097,- direalisasikan sebesar Rp. 17.875.306.195,- atau tingkat serapannya mencapai 76,01%.

III.2 Capaian kinerja urusan wajib pemerintahan yang tidak berdasarkan pelayanan dasar sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 6 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 2.327.858.924,- direalisasikan sebesar Rp. 1.699.505.770,- atau tingkat serapannya mencapai 73,00%.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana didukung oleh pelaksanaan 7 program dan 16 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 5.200.218.038,- direalisasikan sebesar Rp. 4.858.275.798,- atau tingkat serapannya mencapai 98,28%.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 921.601.400,- direalisasikan sebesar Rp. 318.156.480,- atau tingkat serapannya mencapai 34,50%.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; program Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh satu kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu anggaran Rp. 3.252.553.847,- direalisasikan sebesar Rp. 119.325.000,- atau tingkat serapannya mencapai 3,67%.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan didukung oleh pelaksanaan 8 program dan 16 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 32.758.923.458,- direalisasikan sebesar Rp. 30.857.824.190,- atau tingkat serapannya mencapai 94,20%.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh pelaksanaan 4 program dan 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 852.218.887,- direalisasikan sebesar Rp. 781.373.835,- atau tingkat serapannya mencapai 91,69%.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 7 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 3.929.062.417,- direalisasikan sebesar Rp. 3.061.755.960,- atau tingkat serapannya mencapai 77,92%.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 20.210.043.998,- direalisasikan sebesar Rp. 17.095.011.577,- atau tingkat serapannya mencapai 84,59%.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 9.932.427.020,- direalisasikan sebesar Rp. 9.448.497.613,-

atau tingkat serapannya mencapai 95,13%.

- j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro didukung oleh pelaksanaan 6 program dan 6 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 1.700.329.406,- direalisasikan sebesar Rp. 1.542.406.858,- atau tingkat serapannya mencapai 90,7%.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh pelaksanaan 5 program dan 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 7.059.963.225,- direalisasikan sebesar Rp. 6.065.829.723,- atau tingkat serapannya mencapai 85,92%.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 9.386.013.660,- direalisasikan sebesar Rp. 7.146.561.489,- atau tingkat serapannya mencapai 75,41%.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 153.592.100,- direalisasikan sebesar Rp. 146.764.500,- atau tingkat serapannya mencapai 95,55%.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 706.101.845,- direalisasikan sebesar Rp. 648.708.350,- atau tingkat serapannya mencapai 91,87%.

- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 2 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 311.405.820,- direalisasikan sebesar Rp. 282.567.800,- atau tingkat serapannya mencapai 90,74%.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 220.110.200,- direalisasikan sebesar Rp. 184.448.300,- atau tingkat serapannya mencapai 84,25%.

III.3 Capaian kinerja urusan pilihan pemerintahan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 8 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 1.286.101.397,- direalisasikan sebesar Rp. 1.109.621.077,- atau tingkat serapannya mencapai 86,28%.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 4 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 1.136.322.957,- direalisasikan sebesar Rp. 1.023.512.000,- atau tingkat serapannya mencapai 90,07%.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didukung oleh pelaksanaan 5 program dan 10 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 9.419.331.580,- direalisasikan sebesar

Rp. 8.536.651.310,- atau tingkat serapannya mencapai 90,63%.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh pelaksanaan 6 program dan 7 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 18.169.407.773,- direalisasikan sebesar Rp. 16.097.295.359,- atau tingkat serapannya mencapai 88,59%.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 960.638.114,- direalisasikan sebesar Rp. 842.135.099,- atau tingkat serapannya mencapai 87,66%.

III.4 Capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Unsur Sekretariat Daerah; dilaksanakan oleh 9 Bagian didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 42.444.206.947,- direalisasikan sebesar Rp. 36.349.003.646,- atau tingkat serapannya mencapai 85,64%.

b. Unsur Sekretariat Dewan; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 6 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 21.520.141.442,- direalisasikan sebesar Rp. 11.577.508.690,- atau tingkat serapannya mencapai 53,88%.

III.5 Capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan Tahun

2021 sebagai berikut :

- a. Unsur Perencanaan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 6 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 3.108.079.180,- direalisasikan sebesar Rp. 2.825.152.801,- atau tingkat serapannya mencapai 90,89%.
- b. Unsur Keuangan (Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah); dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 4 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 25.355.466.991,- direalisasikan sebesar Rp. 17.003.688.767,- atau tingkat serapannya mencapai 67,06%.
- c. Unsur Keuangan (Pengelolaan Pendapatan Daerah); dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 1.954.052.008,- direalisasikan sebesar Rp. 1.869.361.090,- atau tingkat serapannya mencapai 95,66%.
- d. Unsur Kepegawaian; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 4.933.303.138,- direalisasikan sebesar Rp. 2.597.474.684,- atau tingkat serapannya mencapai 52,65%.
- e. Unsur Penelitian dan Pengembangan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 3 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 1.169.145.010,- direalisasikan sebesar Rp. 1.142.334.000,- atau tingkat serapannya mencapai 97,71%.
- f. Unsur Pengawasan; dilaksanakan oleh Inspektorat didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 4 kegiatan

dengan jumlah pagu anggaran Rp. 733.941.142,- direalisasikan sebesar Rp. 397.044.531,- atau tingkat serapannya mencapai 52,64%.

g. Unsur Kewilayahan; dilaksanakan oleh 4 Kecamatan didukung oleh pelaksanaan 4 program dan 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 18.586.043.654,- direalisasikan sebesar Rp. 15.863.767.316,- atau tingkat serapannya mencapai 85,35%.

h. Unsur Pemerintahan Umum; dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik didukung oleh pelaksanaan 6 program dan 13 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 9.660.386.708,- direalisasikan sebesar Rp. 8.623.618.612,- atau tingkat serapannya mencapai 89,27%.

IV. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 sampai dengan laporan ini dibuat masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

V. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

VI. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH

Target Pendapatan pada APBD Kota Pasuruan Tahun 2021 sebesar Rp. 777.037.738.110,- dengan realisasi sebesar Rp.

836.662.370.208,66,- capaian realisasi sebesar 107,67%. Adapun rincian pendapatan antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp. 130.301.659.434,- dan realisasi sebesar Rp. 129.194.349.746,66,- capaian realisasi 99,15 %.
2. Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 637.984.111.620,- dan realisasi sebesar Rp. 700.206.060.982,- capaian realisasi 109,75 %.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan anggaran sebesar Rp. 8.751.967.056,- dan realisasi sebesar Rp. 7.261.959.480,- capaian realisasi 82,98 %.

Total Belanja pada APBD Kota Pasuruan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.048.788.636.231,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.584.017.159,52,- capaian realisasi sebesar 81,86 %. Adapun rincian Belanja antara lain :

1. Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 863.055.571.996,- dan realisasi sebesar Rp. 755.199.783.115,45,- capaian realisasi 87,50 %.
2. Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 169.163.768.495,- dan realisasi sebesar Rp. 93.025.829.540,07,- capaian realisasi 54,99 %
3. Belanja Tak Terduga dengan anggaran sebesar Rp. 16.569.295.740,- dan realisasi sebesar Rp. 10.358.404.504,- capaian realisasi 62,52 %

Data tersebut diatas merupakan masih bersifat sementara karena proses audit Badan Pemeriksa Keuangan masih berlangsung.

VII. INOVASI DAERAH

1. Pasti Daku Kawin (Pemenuhan Status Hayati Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Perkawinan) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

2. Pesta Terakhir (Pemenuhan Status Hayati Cerai Hidup Terintegrasi) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
3. PETERPAN (Pemenuhan Terpadu Pemenuhan Hak Sipil Anak) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4. GETUK TULAR (Gerakan Tuntas Akta Kematian dan Kelahiran) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
5. OKE (Online di Kelurahan) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
6. OK (Online Kependudukan) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
7. AKI (Akta Kematian Keliling) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
8. Si Jempol (Akta Kematian Jemput Bola) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
9. Tamat Terbenam Bumi (Akta Kematian Terbit Sebelum Jenazah/Mayat dikebumikan) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
10. KADO (KK dan KTP-el Delivery Order) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
11. GERILYAWAN (Gerakan Perekaman Biometrik Langsung Kepada Warga Kota Pasuruan) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
12. Lampid Online (Lahir Mati Pindah Datang) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. SIP (Sistem Informasi Penduduk) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. JALAN BERDUA (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK dan KTP-EL dengan KUA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
15. TITIK NOL (Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Pengadilan Agama Secara On Line) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

16. SIAP PAK RT! (Sistem Informasi Aplikasi Penduduk untuk Pak RT) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
17. Taman Edukasi Anak (Lalu Lintas) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Pertamanan;
18. Laskar Sapu Bersih Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Pertamanan;
19. SATU QIBLAT (Sarana Tunas Qori' dan Qoriah Berkualitas dan Berprestasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan);
20. Aplikasi PERKASA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
21. Aplikasi SIDUGA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
22. SULTAN DIMAS (Konsultasi Kearsipan Digital Melalui Aplikasi SISURAT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. SI LOLITA (Promosi Lomba Literasi Perpustakaan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
24. KOPLING MAS (Kolaborasi Perpustakaan Keliling dengan Masyarakat) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. PODI (Pasuruan Books Of Digital) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
26. SMART GO (Smart Government) Kecamatan Panggungrejo;
27. TUTUR RAMAH (Infrastruktur yang Ramah dan Nyaman) Kecamatan Panggungrejo;
28. SIMASKOT GO Badan Kepegawaian Daerah;
29. SIAP BOS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. E-New Purut (Pendaftaran Online) RSUD Dr. Soedarsono;
31. Klinik Geriatri RSUD Dr. Soedarsono;
32. Pelayanan Hemodialisis RSUD Dr. Soedarsono;
33. OK (Kamar Operasi) tekanan negatif RSUD Dr. Soedarsono;
34. PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) RSUD Dr. Soedarsono;

35. ICU (*Intensive Care Unit*) isolasi tekanan negatif RSUD Dr. Soedarsono;
36. BDRS (Bank Darah Rumah Sakit) RSUD Dr. Soedarsono;
37. PELANGI SAKINA (Peduli dan Sayangi Ibu Stop Angka Kematian Ibu dan Anak) Dinas Kesehatan;
38. SEMAR (Senin Selasa Minggu Pertama) Dinas Kesehatan;
39. WARPIMNAT ODGJ (Warga Pendamping Obat pada pasien orang dengan gangguan jiwa) Dinas Kesehatan;
40. KLINIK PINK (Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan terkait IMS dan HIV) Dinas Kesehatan;
41. Ekadamas-MLP Gema Cermat (Edukasi Pemberdayaan Masyarakat-Multi Level Promoting Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) Dinas Kesehatan;
42. GERTAK CHINTA (Gerakan Serentak Cegah Bahaya Hipertensi Kita) Dinas Kesehatan;
43. ANGSAL GISI (Penanganan Masalah Gizi Terintegrasi) Dinas Kesehatan;
44. Klinik PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) HIV Dinas Kesehatan;
45. PELOPOR HASANAH (Pelayanan Program Hamil Sehat Anakpun Berkah) Dinas Kesehatan;
46. TEMAN SI DAVID (Tracing, Testing, Treatment dan Sistem Informasi Data Covid-19) Dinas Kesehatan;
47. SINAR BIRU PKK (Selamatkan Ibu dan Anak dari Sekarang dengan Bergabung Interaktif di Ruang Ulasan Pelayanan Kebidanan Berkualitas) Dinas Kesehatan;
48. BUIH JADI PERMADANI (Ibu Hamil Jalani Persalinan Aman dan Dapat Foto Bayi, Akta dan BPJS) Dinas Kesehatan;
49. TARIK SIS (Pelayanan Terpadu dan Komprehensif Tuberkulosis) Dinas Kesehatan;
50. SECERAH MENTARI (Selalu Ceria Gembira Hati, Melawan Takut saat diedukasi, diperiksa dan diobati) Dinas Kesehatan;

51. TERANGI BUMI (Setetes Darah Mencegah Kematian Ibu Hamil) Dinas Kesehatan;

VIII. PENGHARGAAN

1. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2021 ; Pasti Daku Kawin” (Pemenuhan Status Hayati Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perkawinan);
2. TOP 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021; “Pesta Terakhir” Pemenuhan Status Hayati Cerai Hidup Terintegrasi;
3. Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 kategori Madya;
4. Penghargaan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Terbaik Tahun 2021 oleh BKKBN;
5. Kota Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2021;
6. Puskesmas Dengan Indeks Keluarga Sehat Tertinggi; Puskesmas Karangketug;
7. Terbaik 1 Pelaksana Terbaik 10 Program PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur 2021 Kategori Kota.

IX. PENUTUP

Dengan terwujudnya RLPPD Tahun 2021 ini disampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai dan untuk itu agar terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat serta melaksanakan tupoksinya dengan kerja keras, jujur, dan ikhlas semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
2. Kepada seluruh stake holders dan publik, atas partisipasi dan dukungannya didalam menciptakan situasi dan kondisi Kota

Pasuruan yang aman dan damai sehingga pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Termasuk atas masukan dan kritikan yang membangun atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama ini.

InsyaAllah dengan membangun kebersamaan, kekompakan dan sinergitas bersama, maka dapat kita wujudkan Kota Pasuruan terus meningkatkan kinerja dan prestasinya yang terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penyelenggaraan Pembangunannya, hasilnya dapat merata, adil dan mensejahterakan masyarakat Kota Pasuruan.

Mengakhiri RLPPD ini, Pemerintah Kota Pasuruan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat sehingga situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Pemerintah Kota Pasuruan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, Maret 2021

